

**Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan
HAM Kep. Bangka Belitung
Catatan Atas Laporan Keuangan**

**Untuk Periode Tahunan Tahun Anggaran 2021
Berakhir 31 Desember 2021**

**Ditjen Pemasyarakatan
(05) UAPPA-W
AUDITED**

Jl. Pulau Bangka Komp. Perkantoran Gubernur
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Air Itam-Pangkalpinang
Telp. (0717) 439435-439439. Fax (0717)439435

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung (05) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung (Ditjen Pemasarakatan) Tahunan Tahun Anggaran 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung (Div.Pemasarakatan). Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pangkalpinang, 11 Mei 2022
Kepala Kantor Wilayah

T. DANIEL L. TOBING
NIP. 196212301988031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi.....	3
Pernyataan Tanggung Jawab	4
Ringkasan	5
I. Laporan Realisasi Anggaran	7
II. Neraca	8
III. Laporan Operasional	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	10
V. Catatan atas Laporan Keuangan	11
A. Penjelasan Umum	11
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	24
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca.....	29
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	36
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	41
F. Pengungkapan Penting Lainnya.....	44

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG
DITJEN PEMASYARAKATAN (05)**

Jl. Pulau Bangka Komp. Perkantoran Gubernur Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Air Itam-Pangkalpinang
Telp. (0717) 439435-439439. Fax (0717)439435

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung (DITJEN PEMASYARAKATAN) tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Pangkalpinang, 11 Mei 2022
Kepala Kantor Wilayah

T. DANIEL L. TOBING
NIP 196212301988031001

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung Tahunan Tahun Anggaran 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp194.471.209** atau mencapai 465 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar **Rp41.845.000**.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp60.857.390.116** atau mencapai 99 persen dari alokasi anggaran sebesar **Rp61.649.909.000**.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar **Rp228.933.095.653** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar **Rp1.294.772.292**; Aset Tetap (neto) sebesar **Rp226.152.491.477**; dan Aset Lainnya (neto) sebesar **Rp1.485.831.884**.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp24.439.206** dan **Rp228.908.656.447**.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021

adalah sebesar **Rp140.475.116**, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar **Rp66.548.617.122** sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai **Rp66.408.142.006**. Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar **Rp2.283.322** dan **Rp0** sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar **Rp66.405.858.684**.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar **Rp231.600.372.724** ditambah Defisit-LO sebesar **Rp66.405.858.684** kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai **Rp(5.069.614.086)** dan Transaksi Antar Entitas senilai **Rp68.783.756.493**, serta penurunan ekuitas senilai **Rp2.691.716.277** sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai **Rp228.908.656.447**.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEP.BANGKA BELITUNG
(DITJEN PEMASYARAKATAN)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	Per 31 Desember 2021		% thd Angg	Realisasi Per 31 Desember 2020
		ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	41.845.000	194.471.209	464,74	85.749.797
JUMLAH PENDAPATAN		41.845.000	194.471.209	464,74	85.749.797
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	29.103.541.000	29.036.472.886	99,77	27.308.808.508
Belanja Barang	B.2.2	32.375.668.000	31.651.547.230	97,76	27.501.705.949
Belanja Modal	B.2.3	170.700.000	169.370.000	99,22	1.000.000
JUMLAH BELANJA		61.649.909.000	60.857.390.116	98,71	54.811.514.457

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEP.BANGKA BELITUNG
(DITJEN PEMASYARAKATAN)
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
ASET			
ASET LANCAR			
Persediaan	C.1	1.294.772.292	524.732.249
Jumlah Aset Lancar		1.294.772.292	524.732.249
ASET TETAP			
Tanah	C.2	161.507.895.000	161.087.895.000
Peralatan dan Mesin	C.3	31.006.864.286	24.589.374.120
Gedung dan Bangunan	C.4	71.309.710.071	76.952.546.071
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.5	-	114.926.000
Aset Tetap Lainnya	C.6	45.143.245	45.143.245
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.7	(37.717.121.125)	(31.370.273.553)
Jumlah Aset Tetap		226.152.491.477	231.419.610.883
ASET LAINNYA			
Aset Lain-Lain	C.8	2.882.110.632	1.166.130.632
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.9	(1.396.278.748)	(1.158.334.091)
Jumlah Aset Lainnya		1.485.831.884	7.796.541
JUMLAH ASET		228.933.095.653	231.952.139.673
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.10	22.210.500	351.766.949
Pendapatan Diterima Dimuka	C.11	2.228.706	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		24.439.206	351.766.949
JUMLAH KEWAJIBAN		24.439.206	351.766.949
EKUITAS			
Ekuitas	C.12	228.908.656.447	231.600.372.724
JUMLAH EKUITAS		228.908.656.447	231.600.372.724
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		228.933.095.653	231.952.139.673

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEP.BANGKA BELITUNG
(DITJEN PEMASYARAKATAN)
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	140.475.116	85.749.745
JUMLAH PENDAPATAN		140.475.116	85.749.745
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	29.025.271.886	27.313.462.508
Beban Persediaan	D.3	2.670.695.401	3.031.840.997
Beban Barang dan Jasa	D.4	25.062.966.994	22.385.536.460
Beban Pemeliharaan	D.5	2.872.222.749	1.627.499.689
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.581.110.200	1.528.825.600
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	5.336.349.892	5.477.074.221
JUMLAH BEBAN		66.548.617.122	61.364.239.475
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(66.408.142.006)	(61.278.489.730)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D8		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		(47.781.646)	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		50.064.968	42.434.552
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	3.633.322
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		2.283.322	38.801.230
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(66.405.858.684)	(61.239.688.500)
POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(66.405.858.684)	(61.239.688.500)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEP.BANGKA BELITUNG
(DITJEN PEMASYARAKATAN)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	E.1	231.600.372.724	235.797.146.748
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(66.405.858.684)	(61.239.688.500)
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS		(5.069.614.086)	57.020.742
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3	(2.263.703.269)	5.560.000
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4	41.189.355	-
SELISIH REVALUASI ASET		-	3.830.407.919
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.5	(2.848.802.591)	(3.778.947.177)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.6	1.702.419	-
JUMLAH		160.124.899.954	174.614.478.990
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.7	68.783.756.493	56.985.893.734
EKUITAS AKHIR		228.908.656.447	231.600.372.724

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia R.I. , Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Propinsi Kep. Bangka Belitung yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM. R.I. Entitas berkedudukan di Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu, Jalan Pulau Bangka Air Itam Pangkajene- Bangka Belitung.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung Ditjen Pemasarakatan berkomitmen dengan visi **“Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum.”** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa misi sebagai berikut:

- Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas.
- Mewujudkan Pelayanan Hukum yang berkualitas.
- Mewujudkan Penegakan Hukum yang berkualitas.
- Mewujudkan Penghormatan, pemenuhan, dan Perlindungan HAM.
- Mewujudkan Layanan Manajemen Administrasi Kementerian Hukum dan HAM.
- Mewujudkan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM Yang Profesional dan Berintegritas.

Adapun Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung yaitu “PASTI” :

- Profesional
- Akuntabel
- Sinergi
- Transparan
- Inovatif

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung Tahunan Tahun Anggaran 2021 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung adalah 10 satuan kerja. Rincian satuan kerja tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W

No	Kode Wil	Satker	Jumlah/Jenis Kewenangan			Jumlah Satker
			KP	KD	DK	
1	3000	Divpas Babel	-	1	-	1

2	3000	Lapas kelas IIA Pangkalpinang	-	1	-	1
3	3000	Lapas kelas IIB Sungailiat	-	1	-	1
4	3000	Lapas Kelas II B Tanjungpandan	-	1	-	1
5	3000	Rumah Tahanan Muntok	-	1	-	1
6	3000	Bapas Kelas II Pangkalpinang	-	1	-	1
7	3000	Rupbasan Kelas II Pangkalpinang	-	1	-	1
8	3000	Lapas Narkotika kelas III pangkalpinang	-	1	-	1
9	3000	LPKA Kelas II Pangkalpinang	-	1	-	1
10	3000	LPP Kelas III Pangkalpinang	-	1	-	1
Jumlah			-	10	-	10

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber

pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak	100%

	dilakukan pelunasan	
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan

kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

(TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2017 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban

jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Satker di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung (DITJEN PEMASYARAKATAN-05) melakukan beberapa kali revisi DIPA. Revisi yang dilakukan membuat perubahan pagu anggaran disebabkan adanya kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan, khususnya terkait dengan pagu minus Belanja Pegawai pada satker Lapas Kelas IIA Narkotika Pangkalpinang dan BAPAS Kelas II Pangkalpinang yang tidak dapat ditutup dengan revisi anggaran antar satker dalam lingkup satu wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

URAIAN	2021	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
PNBP	41.845.000	41.845.000
Jumlah Pendapatan	41.845.000	41.845.000
Belanja	-	
Belanja Pegawai	27.638.541.000	29.103.541.000
Belanja Barang	30.971.268.000	32.375.668.000
Belanja Modal	195.700.000	170.700.000
Jumlah Belanja	58.805.509.000	61.649.909.000

*Realisasi
Pendapatan
Rp194.471.209*

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp194.471.209** atau mencapai 464,74 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar **Rp41.845.000**. Pendapatan di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung berasal dari:

1. Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya;
2. Pendapatan Sewa tanah, Gedung, dan Bangunan;
3. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran

- Yang Lalu;
4. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu; dan
 5. Pendapatan Jasa lainnya.

**Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Per 31 Desember 2021**

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	1.200.000	19.645.500	1.637,13
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	7.780.000	58.673.322	754,16
Pendapatan Jasa Lainnya	32.865.000	64.385.000	195,91
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	15.025.060	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	36.742.327	#DIV/0!
Jumlah	41.845.000	194.471.209	464,74

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 126,79% dibandingkan realisasi pendapatan per 31 Desember 2020.

**Perbandingan Realisasi Pendapatan
Per 31 Desember 2021 dan 2020**

URAIAN	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020	NAIK (TURUN) %
PNBP	194.471.209	85.749.797	126,79
Jumlah	194.471.209	85.749.797	126,79

*Realisasi
Belanja Negara
Rp60.857.390.116*

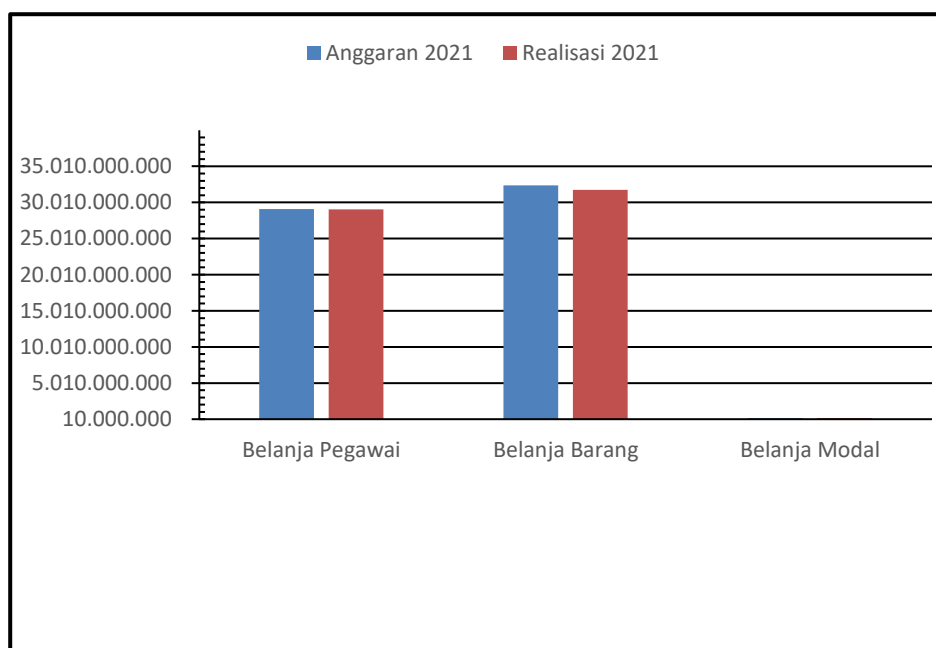
B.2 BELANJA

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp60.857.390.116** atau 98,71% dari anggaran belanja sebesar **Rp61.649.909.000** Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 tersaji sebagai berikut:

**Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja
Per 31 Desember 2021**

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	29.103.541.000	29.043.320.603	99,79
Belanja Barang	32.375.668.000	31.734.640.584	98,02
Belanja Modal	170.700.000	169.370.000	99,22
Total Belanja Kotor	61.649.909.000	60.947.331.187	98,86
Pengembalian Belanja	-	89.941.071	#DIV/0!
Total Belanja	61.649.909.000	60.857.390.116	98,71

Komposisi anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2021 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 11,03% dibandingkan realisasi belanja pada TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain :

Adanya kenaikan grade pegawai disebabkan inpassing pegawai di lingkungan pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dari JFU ke JFT, dan adanya pegawai baru CPNS Tahun 2020. Selain itu kenaikan juga disebabkan karena belanja barang dan jasa untuk penanganan pandemi Covid-19.

***Perbandingan Realisasi Belanja
Per 31 Desember 2021 dan 2020***

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	29.036.472.886	27.308.808.508	6,33
Belanja Barang	31.651.547.230	27.501.705.949	15,09
Belanja Modal	169.370.000	1.000.000	16.837,00
Jumlah	60.857.390.116	54.811.514.457	11,03

*Belanja
Pegawai
Rp29.036.472.886*

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp29.036.472.886** dan **Rp 27.308.808.508**. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Berdasarkan tabel perbandingan belanja pegawai, realisasi belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 mengalami kenaikan sebesar 6,33 persen dari realisasi belanja yang berakhir pada 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan antara lain adanya pembayaran gaji bulan ketiga belas Tahun 2021, dan kenaikan grade pegawai disebabkan inpassing pegawai di lingkungan pegawai Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Ke. Bangka Belitung dari JFU ke JFT, serta adanya pegawai baru CPNS.

Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	28.895.454.553	27.191.803.259	6,27
Belanja Lembur	147.866.050	124.137.000	19,12
Jumlah Belanja Kotor	29.043.320.603	27.315.940.259	6,32
Pengembalian Belanja Pegawai	6.847.717	7.131.751	(3,98)
Jumlah Belanja	29.036.472.886	27.308.808.508	6,33

*Belanja
Barang
Rp31.651.547.230*

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir

pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp31.651.547.230** dan **Rp 27.501.705.949**. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan 15,09% dari Realisasi Belanja Barang untuk periode 31 Desember 2020. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh kenaikan realisasi belanja barang untuk pembelian barang yang digunakan untuk mencegah penyebaran penularan Virus Covid-19.

***Perbandingan Belanja Barang
Per 31 Desember 2021 dan 2020***

URAIAN	Realisasi Per 31 Desember 2021	Realisasi Per 31 Desember 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	20.990.145.671	18.646.012.389	12,57
Belanja Barang Non Operasional	2.908.204.897	2.538.921.615	14,54
Belanja Barang Persediaan	2.015.425.057	1.730.543.335	16,46
Belanja Jasa	1.472.055.375	1.381.299.321	6,57
Belanja Pemeliharaan	2.684.606.030	1.676.103.689	60,17
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.581.110.200	1.528.825.600	3,42
Jumlah Belanja	31.651.547.230	27.501.705.949	15,09

Berkaitan dengan alokasi Anggaran dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, Satker pada Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (Divisi Pemsyarakatan-05) mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar **Rp326.154.000**. Anggaran tersebut terserap sebesar **Rp308.184.897** dengan rincian sebagai berikut:

**Belanja Barang untuk Penanganan Pandemi Covid-19
Tahun Anggaran 2021**

AKUN	Uraian Akun	Pagu	Realisasi	Penyerapan %
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	Rp 13.600.000	Rp 9.100.000	66,91
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi	Rp 257.124.000	Rp 249.057.897	96,86
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 55.430.000	Rp 50.027.000	90,25
	JUMLAH	Rp 326.154.000	Rp 308.184.897	94,49

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Persediaan

Rp1.294.772.292

C.1 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar **Rp1.294.772.292** sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar **Rp524.732.249**. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dalam masa pandemi Covid-19, barang atau perlengkapan tersebut juga digunakan untuk penanganan Pandemi Covid-19. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Per Desember TA 2021 dan 2020

Persediaan	TA 2021	TA 2020
Barang Konsumsi	913.120.757	203.173.149
Amunisi	361.926.535	321.559.100
Bahan Untuk Pemeliharaan	19.725.000	-
Jumlah	1.294.772.292	524.732.249

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Berkaitan dengan Persediaan dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, terdapat Persediaan dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 yang dibeli sendiri, serta dari transfer yang masih bersaldo. Persediaan tersebut dalam keadaan baik dan siap pakai pada tanggal 31 Desember 2021. Berikut ini daftar persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 :

**Rincian Persediaan dalam Rangka Penanganan Pandemi
Covid-19 Per 31 Desember 2021**

No.	Nama Satker	Nama Barang Persediaan	Jumlah Unit	Nilai Rupiah		
1	LPKA Kelas II Pangkalpinang	Masker	6	Rp 171.000		
		Sarung Tangan	5	Rp 390.000		
		Alat Rapid Test Antigen	1	Rp 1.650.000		
		Masker	10	Rp 285.000		
		Sarung Tangan	2	Rp 368.000		
		Hand Sanitizer	3	Rp 231.000		
		Sabun Cuci Tangan	3	Rp 72.000		
		Vitamin Enervon C	5	Rp 670.000		
		Masker Kain	50	Rp 350.000		
		Masker Biasa	5	Rp 100.000		
		Masker	20	Rp 500.000		
		Hevit C 500 Mg	2	Rp 150.000		
		Hevit C 500 Mg	1	Rp 70.000		
		Vitalife C500Mg	6	Rp 192.000		
		Vitacimin 200 tb	1	Rp 200.000		
		Xonce Kaplet	13	Rp 78.000		
		APD	20	Rp 42.865.320		
		Hand Sanitizer	20	Rp 1.448.860		
		Masker	5	Rp 1.988.775		
		Masker Karet	9	Rp 243.000		
		Hevit C 500 Mg	4	Rp 272.000		
		Hevit C 500 Mg	1	Rp 92.000		
		Masker Karet	10	Rp 410.000		
		Hevit C 500 mg	10	Rp 920.000		
		Masker	5	Rp 250.000		
		2	Lapas Kelas IIB Tanjungpandan	Handsanitizer	1	Rp 200.000
				Handsoap	4	Rp 300.000
				Masker	1	Rp 210.000
				Masker SixC	1	Rp 35.000
				Masker Layer	4	Rp 100.000
				Masker Bioxi	1	Rp 60.000
				Sensi Gloves	1	Rp 190.000
				Masker Bioxi	10	Rp 600.000
Sensi Gloves	5			Rp 950.000		
Handsanitizer	5			Rp 1.000.000		
Handsoap	5			Rp 375.000		
Handsanitizer	2			Rp 400.000		
Handsoap Strawberry	2			Rp 150.000		
Handsoap Lavender	2			Rp 150.000		
Altamed Karet	5			Rp 225.000		
Masker	1			Rp 575.000		
Altamed Hijab	5			Rp 250.000		
Masker 3M/N95 Onemed	4			Rp 100.000		
Handsanitizer	5			Rp 1.000.000		
Masker KN95	300			Rp 1.500.000		
Masker Sensi Duckbill	150			Rp 525.000		
Hand Sanitizer 5L	10			Rp 2.000.000		
Hand Soap 5L	10			Rp 750.000		
Evo Plusmed Merah Putih	3			Rp 465.000		
Masker Bioxi	10			Rp 600.000		
Sensi Gloves	10			Rp 1.900.000		
Handsanitizer	5			Rp 1.000.000		
Handsoap	10			Rp 750.000		
Masker Bioxi	10			Rp 600.000		
Sensi Gloves	10			Rp 1.900.000		
Handsanitizer	5			Rp 1.000.000		
Handsoap	10			Rp 750.000		
Masker Bioxi	10			Rp 600.000		
Sensi Gloves	10			Rp 1.900.000		
Handsanitizer	8			Rp 1.600.000		
Handsoap	8			Rp 600.000		
Masker Bioxi	20			Rp 1.200.000		
Sensi Gloves	5			Rp 950.000		
Handsanitizer	10			Rp 2.000.000		
Handsoap	10			Rp 750.000		
Masker Bioxi	20			Rp 1.200.000		
Sensi Gloves	5			Rp 950.000		
Handsanitizer	10			Rp 2.000.000		
Handsoap	10			Rp 750.000		
Masker Univ	60			Rp 3.000.000		
Handsoen No. 8	72			Rp 576.000		
Disinfektan	48			Rp 2.928.000		
Hand Soap 400ml	46	Rp 2.070.000				
Sensi Tizer 240ml	46	Rp 2.070.000				
Face Sheild	96	Rp 1.440.000				
Masker Univ	140	Rp 7.000.000				
Masker Altamed	12	Rp 540.000				
Handscoon No. 7,5-8	21	Rp 168.000				
Handscoon Uk. M	2	Rp 280.000				
Disinfektan	196	Rp 11.956.000				
Hand Soap 400ml	170	Rp 7.650.000				
Sensi Tizer 240ml	61	Rp 2.745.000				
Sensi Tizer 100ml	8	Rp 184.000				
Face Sheild	200	Rp 3.000.000				
JUMLAH			2.128	134.683.955		

Tanah

Rp161.507.895.000

C.2 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kep.Bangka Belitung per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp161.507.895.000** , sedangkan per 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp161.087.895.000**.

TANAH	
Saldo Awal	161.087.895.000
Mutasi Tambah	420.000.000
Mutasi Kurang	-
Saldo Per 31 Desember 2021	161.507.895.000

Mutasi tambah tanah pada TA 2021 berupa hibah tanah seluas 30.000 m² dengan nilai sebesar Rp420.000.000 yang diterima oleh satker Lembaga Masyarakat Kelas IIB Sungailiat pada tahun 2020 dari Pemerintah Kabupaten Bangka, dan telah dilakukan pengesahan hibah pada TA 2021. Adapun Rincian Tanah di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung terletak:

di Jl. Merdeka muntok, Jl.Ican saleh, Jl.sungai selan (Lapas Perempuan), Jl. Ahmad yani , Jl.Tua Tunu, Jl.Bukit Semut, Jl.Lintas Timur, Jl.Cerucuk Badau, Samping RRI Pemancar Kimak Sungailiat.

Peralatan dan

Mesin

Rp31.006.864.286

C.3 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp31.006.864.286** dan **Rp24.589.374.120**. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Peralatan dan Mesin	
Saldo Awal	24.589.374.120
Mutasi Tambah	7.694.855.034
Mutasi Kurang	1.277.364.868
Saldo Per 31 Desember 2021	31.006.864.286

*Gedung dan
Bangunan
Rp71.309.710.071*

C.4 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah **Rp71.309.710.071** dan **Rp76.952.546.071**. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Gedung dan Bangunan	
Saldo Awal	Rp 76.952.546.071
Mutasi tambah:	Rp 16.831.577.000
Mutasi Kurang:	Rp 22.474.413.000
Saldo per 31 Desember 2021	Rp 71.309.710.071

*Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp0*

C.5 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kep.Bangka Belitung per 31 Desember 2021 sebesar **Rp0** dan 31 Desember 2020 sebesar **Rp114.926.000**. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Irigasi	
Saldo Awal	Rp 114.926.000
Mutasi tambah	Rp -
Mutasi Kurang	Rp 114.926.000
Saldo per 31 Desember 2021	Rp -

*Aset Tetap
Lainnya
Rp45.143.245*

C.6 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sama yaitu sebesar **Rp45.143.245** karena tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang. Aset tetap lainnya tersebut berupa buku dan bahan kartografi.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap*

C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31

Rp37.717.121.125 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing **Rp37.717.121.125** dan **Rp 31.370.273.553**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Gedung dan Bangunan	Rp 71.309.710.071	Rp 15.721.082.676	Rp 55.588.627.395
4	Peralatan dan Mesin	Rp 31.192.995.066	Rp 21.996.038.449	Rp 9.196.956.617
6	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Rp 2.880.125.632	Rp 1.396.278.748	Rp 1.483.846.884
Akumulasi Penyusutan		Rp 102.502.705.137	Rp (37.717.121.125)	Rp 64.785.584.012

Aset Lain-Lain **C.8 Aset Lain-Lain**

Rp2.882.110.632

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp2.882.110.632** dan **Rp1.166.130.632**. Terdapat mutasi tambah pada Aset lain-lain sebesar **Rp1.715.980.000**. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Akumulasi Penyusutan

dan

Amortisasi

Aset Lainnya

Rp1.396.278.748

C.9 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp1.396.278.748** dan **Rp1.158.334.091**. Rincian akumulasi amortisasi dan penyusutan aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Lain-lain	2.880.125.632	1.396.278.748	1.483.846.884
Jumlah	2.880.125.632	1.396.278.748	1.483.846.884

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp22.210.500*

C.10 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar **Rp22.210.500** dan **Rp 351.766.949**. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2021 merupakan utang pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan/Tahanan TA 2021 pada Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang berdasarkan Surat Pernyataan Utang Nomor W.7.PAS.PAS.4-KU.01.01-1341 Tanggal 31 Desember 2021.

*Pendapatan
Diterima
Dimuka
Rp2.228.706*

C.11 Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar **Rp2.228.706** dan **Rp0**. Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2021 merupakan pendapatan diterima dimuka atas sewa Gedung dan bangunan berupa kantin pada satker RUTAN Kelas IIB Muntok sebesar **Rp1.043.422** dan RUPBASAN Pangkalpinang sebesar **Rp1.185.284**.

*Ekuitas
Rp228.908.656.447*

C.12 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

adalah masing-masing sebesar **Rp228.908.656.447** dan **Rp231.600.372.724**. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan
PNBP
Rp140.475.116*

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar **Rp140.475.116** dan **Rp85.749.797**. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	19.645.500	15.168.220	77,21
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	56.444.616	28.431.525	50,37
Pendapatan Jasa Lainnya	64.385.000	42.150.000	65,47
Penerimaan Kembali Belanja TAYL		52	
Jumlah	140.475.116	85.749.797	61,04

*Beban
Pegawai
Rp29.025.271.886*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp29.025.271.886** dan **Rp27.313.462.508**. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020	NAIK (TURUN) %
BEBAN PEGAWAI :			
Beban Gaji PNS	18.764.691.980	17.946.814.440	5
Beban Pembulatan Gaji	348.177	388.063	(10)
Beban Tunjangan-Tunjangan	5.127.724.545	4.584.034.455	12
Beban Uang Makan PNS	4.991.488.851	4.665.220.301	7
Beban Lembur	147.866.050	124.137.000	19
TOTAL BEBAN	29.032.119.603	27.320.594.259	6
PENGEMBALIAN :			
Pengembalian Gaji Pokok PNS	5.324.346	5.462.700	(3)
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	8.371	3.165	164
Pengembalian Beban Tunjangan-Tunjangan	1.515.000	1.665.035	(9)
Pengembalian Beban Uang Makan PNS	-	851	(100)
TOTAL PENGEMBALIAN	6.847.717	7.131.751	(4)
JUMLAH BEBAN (NETTO)	29.025.271.886	27.313.462.508	6

*Beban
Persediaan
Rp2.670.695.401*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp2.670.695.401** dan **Rp3.031.840.997**. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	2.669.873.481	2.997.941.747	(10,94)
Beban Persediaan Amunisi	821.920	33.899.250	(97,58)
Jumlah Beban Persediaan	2.670.695.401	3.031.840.997	(11,91)

*Beban Barang
dan Jasa
Rp25.062.966.994*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp25.062.966.994** dan **Rp22.385.536.460**. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	20.754.883.576	20.565.995.605	0,92
Beban Barang Non Operasional	2.902.444.897	456.169.863	536,26
Beban Langganan Daya dan Jasa	1.472.055.375	1.386.533.690	6,17
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	16.676.500	5.155.000	223,50
TOTAL BEBAN	25.146.060.348	22.413.854.158	12,19
PENGEMBALIAN			
Pengembalian Beban Pengadaan BAWA	83.093.354	22.686.598	266,27
Pengembalian Beban Bahan	0	5631100	-100,00
TOTAL PENGEMBALIAN	83.093.354	28.317.698	193,43
TOTAL BEBAN (NETTO)	25.062.966.994	22.385.536.460	11,96

*Beban
Pemeliharaan
Rp2.872.222.749*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp2.872.222.749** dan **Rp1.627.499.689**. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.998.781.115	1.200.550.093	66,49
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	614.370.585	420.572.596	46,08
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Penanganan Pandemi	0	5.727.000	-100,00
Beban Persediaan Bahan Pemeliharaan	259.071.049	650.000	39757,08
Jumlah	2.872.222.749	1.627.499.689	76,48

*Beban
Perjalanan Dinas
Rp1.581.110.200*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp1.581.110.200** dan **Rp1.528.825.600**. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk per 31 Desember

2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	1.045.060.200	729.604.100	43,24
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	536.050.000	672.488.000	-20,29
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	128.883.500	-100,00
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	2.150.000	-100,00
Jumlah	1.581.110.200	1.528.825.600	3,42

*Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
Rp5.336.349.892*

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp5.336.349.892** dan **R5.477.074.221**. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.135.617.077	3.020.947.879	4
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.163.883.331	2.444.934.014	(11)
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	3.534.616	6.876.787	(49)
Beban Penyusutan Aset Tetap Yang tdk digunakan	33.314.868	4.315.541	672
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.336.349.892	5.477.074.221	(3)

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp2.283.322*

D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

untuk per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional untuk Per 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	47.781.646	0	#DIV/0!
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	50.064.968	42.434.552	17,98
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	3.633.322	-100,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	2.283.322	38.801.230	-94,12

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp231.600.372.724

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp 231.600.372.724** dan Rp 235.797.146.748.

Defisit LO

Rp66.405.858.684

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah defisit sebesar **Rp66.405.858.684** dan **Rp61.239.688.500**. Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Koreksi Atas

Reklasifikasi

Rp(2.263.703.269)

E.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi atas reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar **Rp(2.263.703.269)** dan **Rp5.560.000**.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp41.189.355

E.4 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi atas reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp41.189.355 dan Rp0.

Koreksi Nilai

Aset Tetap Non

Revaluasi

Rp(2.848.802.591)

E.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi atas reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar **Rp(2.848.802.591)** dan **Rp(3.778.947.177)**.

Koreksi Lain-

Lain

Rp1.702.419

E.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi atas reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar **Rp1.702.419** dan **Rp0**.

Transaksi
Antar Entitas
Rp68.783.756.493

E.7 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp68.783.756.493** dan **Rp56.985.893.734**. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(194.471.209)
Ditagihkan ke Entitas Lain	60.857.390.116
Transfer Masuk	9.516.194.284
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	420.000.000
Transfer Keluar	(1.815.356.698)
Surplus/Defisit dari Keg Non Operasional	68.783.756.493

E.7.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Pada periode hingga 31 Desember 2021, terdapat DDEL sebesar **Rp(194.471.209)** dan DKEL sebesar **Rp60.857.390.116**.

E.7.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk dan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp9.702.325.064** dan **Rp(1.815.356.698)**.

Dalam rangka penanganan Pandemi Covid 19, pada satker pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung terdapat transaksi Transfer masuk sebesar **Rp1.309.990.890** dan transaksi Transfer keluar sebesar **Rp654.995445**, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Transfer Masuk Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid 19 Per 31 Desember 2021

No	Kode Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Jenis Barang	Kuantitas Barang	Kode Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Nilai Transfer Masuk
1	409237	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Alat Pelindung Diri	280	649003	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BABEL	Rp 600.114.480
			Hand Sanitizer	60			Rp 4.346.580
			Masker	55			Rp 21.876.525
			Thermogun	22			Rp 28.657.860
2	649003	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BABEL	Alat Pelindung Diri	20	352605	LPKA Pangkal Pinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung	Rp 42.865.320
			Hand Sanitizer	20			Rp 1.448.860
			Masker	5			Rp 1.988.775
			Thermogun	4			Rp 5.210.520
3	649003	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BABEL	Alat Pelindung Diri	80	406508	Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pangkalpinang	Rp 171.461.280
			Hand Sanitizer	20			Rp 1.448.860
			Masker	15			Rp 5.966.325
			Thermogun	6			Rp 7.815.780
3	649003	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BABEL	Alat Pelindung Diri	180	683682	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA PANGKAL PINANG	Rp 385.787.880
			Hand Sanitizer	20			Rp 1.448.860
			Masker	35			Rp 13.921.425
			Thermogun	12			Rp 15.631.560
JUMLAH TRANSFER MASUK							Rp 1.309.990.890

Rincian Transfer Masuk Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid 19 Per 31 Desember 2021

No	Kode Satker Pengirim	Nama Satker Pengirim	Jenis Barang	Kuantitas Barang	Kode Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Nilai Transfer Keluar
1	649003	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BABEL	Alat Pelindung Diri	20	352605	LPKA Kelas IIA Pangkalpinang	Rp 42.865.320
				80	406508	Lapas Kelas IIA Pangkalpinang	Rp 171.461.280
				180	683682	Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang	Rp 385.787.880
			Hand Sanitizer	20	352605	LPKA Kelas IIA Pangkalpinang	Rp 1.448.860
				20	406508	Lapas Kelas IIA Pangkalpinang	Rp 1.448.860
				20	683682	Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang	Rp 1.448.860
			Masker	5	352605	LPKA Kelas IIA Pangkalpinang	Rp 1.988.775
				15	406508	Lapas Kelas IIA Pangkalpinang	Rp 5.966.325
				35	683682	Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang	Rp 13.921.425
			Thermogun	4	352605	LPKA Kelas IIA Pangkalpinang	Rp 5.210.520
				6	406508	Lapas Kelas IIA Pangkalpinang	Rp 7.815.780
				12	683682	Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang	Rp 15.631.560
JUMLAH TRANSFER KELUAR							Rp 654.995.445

E.7.3 Pengesahan Hibah Langsung TAYL

Pengesahan Hibah Langsung TAYL sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp420.000.000**, yang merupakan hibah tanah seluas 30.000 m² dengan nilai sebesar Rp420.000.000 yang diterima oleh satker Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sungailiat pada tahun 2020 dari Pemerintah Kabupaten Bangka, dan dilakukan pengesahan hibah pada TA 2021.

Ekuitas Akhir **E.8 Ekuitas Akhir**

Rp228.908.656.447 Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp228.908.656.447** dan **Rp231.600.372.724**.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak Terdapat Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca.



Pangkalpinang, 11 Mei 2022
Kepala Kantor Wilayah

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daniel L. Tobing', is written over the stamp.

T. Daniel L. Tobing
NIP 196212301988031001